



PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

RENJA

PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

KECAMATAN TUGU



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa perencanaan pembangunan harus menekankan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan kesinambungan pembangunan untuk mewujudkan tujuan daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa rencana kerja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.

- (2) Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang memuat memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I berisi tentang pendahuluan;
 - b. bab II berisi tentang hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III berisi tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV berisi tentang rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V berisi tentang penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;

- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Trenggalek;
- aa. Kecamatan Panggul;
- bb. Kecamatan Suruh;
- cc. Kecamatan Durenan;
- dd. Kecamatan Pogalan;
- ee. Kecamatan Watulimo;
- ff. Kecamatan Tugu;
- gg. Kecamatan Dongko;
- hh. Kecamatan Kampak;
- ii. Kecamatan Munjungan;
- jj. Kecamatan Pule;
- kk. Kecamatan Gandusari;
- ll. Kecamatan Bendungan;
- mm. Kecamatan Karangan; dan

mm. Kecamatan Karanganyar; dan
nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Agustus 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

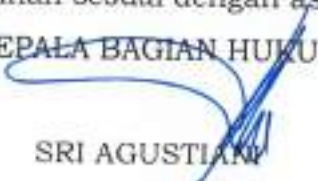
TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

**RENCANA KERJA
KECAMATAN TUGU TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dimana semua Perangkat daerah harus menyusun Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Semua Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tersusunnya RKPD Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Dokumen RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkauan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- a) Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b) Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) tahun 2026;
- c) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- d) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025;
- e) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Ranperda tentang APBD;
- f) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- g) Menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan sedangkan untuk perangkat daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2026. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Prioritas program pelaksanaan Kecamatan Tugu, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2029 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Tugu tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tugu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Tugu tahun 2026 bertujuan :

1. Sebagai acuan Kecamatan Tugu dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tugu pada Tahun 2026;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tugu Tahun 2026;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Kecamatan Tugu Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi, :

- 1.1 Latar belakang,** yang memuat latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.2 Landasan hukum,** yang memuat peraturan perundang-undangan yang mendasari tersusunya Renja Perangkat Daerah
- 1.3 Maksud dan tujuan,** memuat maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika penulisan,** sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU TAHUN LALU

Pada Bab ini menjelaskan:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD), Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD), dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah (PD) dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi,

telaahan yang menyangkut arah kebijakan atas dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan pokok serta fungsi Perangkat Daerah (PD).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD,

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah (PD).

3.3. Program dan Kegiatan,

berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Tugu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dirinci pada tabel 2.1 (T-C.29) berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tugu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01	KECAMATAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100	94,96	100	100	100,00%	100	98,32	98%
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100	98,26	100	98,26	98,26%	100	98,84	99%

		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	99,99	99,99%	100	100	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	188	59	62	62	100%	61	182	97%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	14	16	16	100%	15	45	125%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104	45	46	46	100%	46	137	132%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	1,09	100	104,35	104,35%	100	205	205%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	18	15	15	100%	15	48	63%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124	35	41	41	100%	38	114	92%

X.XX.01.2. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	528	398	322	378	117%	323	1099	208%
X.XX.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	200	39	38	38	100%	38	115	58%
X.XX.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun (dokumen)	18	3	3	3	100%	3	9	50%
X.XX.01.2. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80	17	27	27	100%	27	71	89%
X.XX.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	100%	100	100	100%	100	201	201%
X.XX.01.2. 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	192	50	51	51	100%	52	153	80%
X.XX.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	105,56	100	100	100%	100	306	306%
X.XX.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	2	2	2	100%	2	6	38%

X.XX.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	2	3	3	100%	2	7	44%
X.XX.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	4	3	3	100%	3	10	63%
X.XX.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16	4	4	4	100%	3	11	69%
X.XX.01.2. 06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16	4	4	4	100%	4	12	75%
X.XX.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12	100%	12	36	75%
X.XX.01.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	0	12	12	100%	12	24	50%
X.XX.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	50	100	100	100%	100	250	250%
X.XX.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	2	1	1	100%	2	5	42%
X.XX.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	600	100	100	100	100%	100	300	50%
X.XX.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	40	43	43	100%	40	123	256%

X.XX.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	13	13	13	100%	7	33	69%
X.XX.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	100	100	100	100%	100	300	300%
X.XX.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	12	12	12	100%	12	36	75%
X.XX.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56	17	11	11	100%	18	46	82%
X.XX.01.2. 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	100	100	100	100%	100	300	300%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	72	2	2	2	100%	2	6	8%

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8	2	2	2	100%	2	6	75%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	72	12	24	24	100%	24	60	83%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	8	12	12	12	100%	12	36	450%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40	12	12	12	100%	12	36	90%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	100	300	300%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	72	18	18	18	100%	18	54	75%

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48	12	12	12	100%	12	36	75%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24	6	6	6	100%	6	18	75%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100%	100	300	300%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun	12	2	2	2	100%	1	5	42%
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	2	2	2	100%	1	5	42%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	300	300%

7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	273	4	24	24	100%	24	52	19%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	4	12	12	100%	12	28	175%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6		12	12	100%	12	24	400%

Dari tabel diatas dapat dievaluasi sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/kegiatan yang tidak memenuhi target adalah

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan indikator program Persentase nilai aset dalam kondisi baik dari target kinerja 100% dan terealisasi 98,26 %

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/kegiatan yang telah memenuhi target adalah

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan indikator program Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi dari target kinerja 100% dan terealisasi 100% dan indikator program Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/kegiatan yang telah memenuhi target adalah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target kinerja 100% dan terealisasi 104,35%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Adapun faktor pendukung dan penghambat adalah sebagai berikut: adalah

- Adanya komitmen Bersama seluruh pegawai Kecamatan Tugu untuk melaksanakan program/kegiatan yang diampu sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dalam Renja Perangkat Daerah

- Sinergitas antar pegawai kecamatan yang terjalin dengan baik sehingga bisa melaksanakan kinerja sesuai dengan yang ditargetkan
- Kurangnya data dan informasi yang akurat dan relevan untuk perencanaan dan penganggaran
- Keterbatasan Sumber Daya manusia yang berkualitas
- Adanya kurang ketelitian dalam mengentry target dalam aplikasi sehingga ada beberapa target tidak terpenuhi dan melampaui
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

Dari Realisasi program/kegiatan yang terpenuhi, tidak terpenuhi atau yang melebihi kinerja hasil/keluaran Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tugu tidak ada yang signifikan. Meskipun ada beberapa yang kurang tidak mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran perangkat daerah

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran
- Peningkatan system pengumpulan data dan informasi yang terintegrasi
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan Pendidikan berkelanjutan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kabupaten

Trenggalek. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Tujuan dan Sasaran pada Renstra Kecamatan Tugu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP
3	Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data		Indeks Sinergitas Kecamatan
4		Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan

suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.3 (T-C.30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			78	79,5	81	0	0	0	0	0	Di tahun 2024 tidak ada penilaian RB untuk Kecamatan sehingga realisasi 0 (nol)
2.	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP			84,5(A)	85 (A)	85,5(A)	86,2	84,88(A)	84,88(A)	85,5(A)	86,2	di tahun 2024 ditargetkan nilai capaian sebesar 84,5 terealisasi 84,88 sehingga target dapat terealisasi dengan nilai capaian 100,4%
3.	Indeks Sinergitas Kecamatan			81	81,5	82	88,40	88,3	88,3	82	88,40	di tahun 2024 ditargetkan nilai capaian sebesar 81 terealisasi 88,3 sehingga target dapat terealisasi dengan nilai capaian 109%
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			91	92	92	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	di tahun 2024 ditargetkan nilai capaian sebesar 91 terealisasi 99,99 sehingga target dapat terealisasi dengan nilai capaian 109,9%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Tingkat penyelenggaraan pelayanan Kecamatan dapat dinilai dari beberapa aspek termasuk efisiensi, efektifitas, responsivitas dan kualitas layanan. Dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan meliputi kurangnya sumber daya, kurangnya transparansi dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dalam hal ini tingkat pelayanan di Kecamatan Tugu dikatakan Baik hal tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi indikator sasaran Kecamatan Tugu yaitu indeks kepuasan masyarakat dengan target 99,32 terealisasi 99,99.

Sedangkan permasalahan dan hambatan yang dialami dalam menyelenggarakan tugas fungsi kecamatan adalah

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi terutama dalam pelayanan public dan pembinaan masyarakat;
2. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi dengan mengintegrasikan system informasi dan teknologi dalam pelayanan publik;
3. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi dengan mengintegrasikan system informasi dan teknologi dalam pelayanan publik
4. Belum optimalnya pencegahan penanggulangan bencana alam
5. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan dan pelayanan;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor, serta fasilitas penunjang lainnya yang dapat menghambat kelancaran pelayanan dan kegiatan kecamatan;

7. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kecamatan.

Permasalahan dan hambatan diatas juga menjadi tantangan bagi Kecamatan Tugu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun demikian ada beberapa peluang yang bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan Tugu, peluang tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Contohnya, pengembangan aplikasi pelayanan online, sistem informasi manajemen pelayanan, dan penggunaan media sosial untuk sosialisasi informasi.
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
3. Masyarakat semakin menyadari hak-hak mereka dan tuntutan mereka terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan.
4. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, manajemen, hingga pemanfaatan TIK.

Melihat fenomena tersebut diperlukan sebuah perencanaan program yang komprehensif dan sustainable/berkelanjutan terkait peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik dari sisi kemampuan teknoratis, kedisiplinan, kepekaan/responsiveness, serta keberanian dan semangat untuk melakukan improvisasi dan inovasi agar semua kegiatan yang dilaksanakan efektif, efisien, tepat sasaran dan partisipatif sehingga mencapai ekspektasi capaian kinerja yang diharapkan.

Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan rencana pembangunan nasional seperti SDGs (Sustainable Development Goals) maka Penyusunan Renstra PD dan Renja PD Kecamatan Tugu memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung

pencapaian SDGs dan dilengkapi dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026 Kecamatan Tugu.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi terkait dengan pelayanan Publik
3. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup terkait penanggulangan bencana tanah longsor dan penanganan pengelolaan sampah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 serta RPJMN 2021-2026.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD sebelum nanti akhirnya menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 yang disahkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek. Sangat dimungkinkan dalam proses berjalan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 terjadi perbedaan/pergeseran program/kegiatan beserta pagu anggaran yang disinkronkan dengan program prioritas Provinsi Jawa Timur, Nasional maupun perkembangan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tema Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 adalah **“PEMBANGUNAN KOTA ATRAKTIF DAN PENUNTASAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PENGHAPUSAN KEMISKINAN DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ”**

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 didukung dan dilaksanakan melalui 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Kota Atraktif dan Berwawasan Lingkungan Terintegrasi;
2. Ekonomi Regeneratif dan Inklusif dalam rangka Penghapusan Kemiskinan;
3. Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.4 (TC.31) dibawah ini:

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tugu

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	6	12
	KECAMATAN				3.132.536.000	KECAMATAN				2.372.858.353	
	KECAMATAN TUGU					KECAMATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Tugu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi;	100%	2.925.736.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tugu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi;	100%	2.322.591.160	
		Kec.Tugu	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%			Kec. Tugu	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,27%		
		Kec.Tugu	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			Kec. Tugu	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.717.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.490.235	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	4.717.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	1.221.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	268.635	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.555.563.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.171.336.961	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	2.482.563.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	2.126.770.291	

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	67.000.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	43.500.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	323 Dokumen	3.000.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	323 Dokumen	530.870	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan	3.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan	535.800	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.500.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				125.400	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	6.500.000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	125.400	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				101.400	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen	2.000.000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52 Dokumen	101.400	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.956.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.123.154	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.300.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.155.600	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.100.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.012.400	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.988.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.437.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.800.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.762.000	
		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	27.500.000		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	18.085.919	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.268.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.569.435	

**Renja Kecamatan Tugu
Kabupaten Trenggalek Tahun 2026**

		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.000.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	100.800	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.930.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	40.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.930.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.170.800	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	42 Laporan	50.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	41 Laporan	38.570.800	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan	37.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	600.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.313.210	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	48.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	25.913.210	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	15.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	6.400.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Tugu	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	107.250.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Tugu	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	29.022.016
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			40.000.000		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.324.925	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	40.000.000		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	14.324.925	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.147.715	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.147.715	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			67.250.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.549.376	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	52.250.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12.549.376	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Tugu	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Tugu	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	4.981.792	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				2.595.442	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.595.442	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				2.386.350	
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	45 Keluarga	2.386.350	
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Tugu	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	30.800.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tugu	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	5.495.255	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5.495.255		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.342.715	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	5.800.000		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	1.152.540	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec.Tugu	Persentase laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	38.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Tugu	Persentase laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					38.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun			
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	38.500.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec.Tugu	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	30.250.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Tugu	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	10.768.130	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					30.250.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					10.768.130	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	17.500.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	5.572.700	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12.750.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5.195.430	

Dengan mengacu RKPD 2025-2045 dan RPJMD 2021-2026 dari tabel diatas dapat dijelaskan ada beberapa perbedaan dari tahap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan antara lain:

1. Seiring dengan regulasi-regulasi yang baru terdapat perubahan pagu anggaran ranwal RKPD;
2. Adanya rumusan Sub kegiatan yang baru dan ada sub kegiatan lama yang tidak dipakai.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Konsep Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2026, berdasarkan aspirasi masyarakat serta berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan dan MUSRENA KEREN di Kabupaten Trenggalek. Partisipasi dan peran dari semua pihak dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026.

Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek selaku Perangkat Daerah akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (PD) maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah (PD) dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek, dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugu Tahun 2026 direalisasikan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana terlampir pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugu Tahun 2026 ini.

Sedangkan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Tugu tidak ada yaitu Nihil serta daftar usulan prioritas Musrenbang Kecamatan Tugu sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Trenggalek

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tugu

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1		3	4	5	6
			N I H I L		

**Tabel 2.6 (T-C.32)
Daftar Urutan Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek
Tahun 2026**

No. Urut Prioritas	Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Permasalahan	Lokasi (/Desa /Kel)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									
01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	#MPP Jalan dengan Kondisi Rusak Berat / Peningkatan Jalan (ID Usulan : 1908364)	Perlunya Peningkatan / Pengerasan Jalan karena rusak berat sehingga tidak bisa diakses oleh warga terutama di waktu musim penghujan	Kec. Tugu; Desa/Kel. Prambon; Desa Prambon Jalan Jurusan Masaran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	#MPP Peningkatan PSU Perumahan skala lingkungan (ID Usulan : 1828888)	Kondisi jalan saat ini masih berupa makadam, kalau musim hujan jalan tersebut menjadi licin yang bisa membahayakan bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4	Kec. Tugu; Desa/Kel. Pucanganak; RT. 20 RW. 08 Dusun Sumbermadu Desa Pucanganak Kec. Tugu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No. Urut Prioritas	Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Permasalahan	Lokasi (/Desa /Kel)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam									
01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	#MPP Pengadaan JUT (ID Usulan : 1773163)	Jalan usaha tani Adalah fasilitas yang sangat berpengaruh pada kegiatan dan aktivitas di bidang pertanian dan ekonomi masyarakat desa, untung memper mudah akses dan distribusi hasil pertanian, mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa duren adalah petani.	Kec. Tugu; Desa/Kel. Duren; RT.18 RW.07 Dsn.Gebang	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	#MPP Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alat Pengolah Pupuk Organik) (ID Usulan : 1979202)	Perlunya Alat Mesin Pengolah Pupuk yang memadai karena banyaknya bahan pupuk organik yang belum di gunakan secara maksimal karena keterbatasan peralatan	Kec. Tugu; Desa/Kel. Jambu; RT.22 RW.08 Dusun Mojokidul	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	#MPP Pengembangan Tanaman Hortikultura (Cabai) (ID Usulan : 1900205)	Masih kurangnya minat bagi Petani untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura (Cabai) karena biaya yang di keluarkan masih tinggi sehingga perlunya Bantuan untuk pengadaan Bibit, Pupuk, Obat2an Teknik Tata kelola yang baik	Kec. Tugu; Desa/Kel. Tumpuk; Kelompok Tani Desa Tumpuk	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No. Urut Prioritas	Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Permasalahan	Lokasi (/Desa /Kel)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	#MPP Pengembangan perpustakaan (ID Usulan : 2048630)	Menunjang program Desa Digitalisasi, Perlunya Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Desa mengingat makin banyaknya minat baca Masyarakat terutama anak-anak	Kec. Tugu; Desa/Kel. Banaran; Desa Banaran	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	#MPP Bimbingan Teknis Peningkatan Penyediaan Kualitas Air Minum Tingkat Desa (ID Usulan : 2056245)	Unntuk memenuhi Kualitas air bersih tingkat desa, Beberapa tahun lalu Desa Winong Telah mendapatkan Program PAMSIMAS yang saat ini dan dikelola dengan baik untuk keperluan masyarakat,sebagai langkah Desa untuk mengembangkan potensi yang ada desa kedepan memiliki rencana untuk mendorong usaha BUMDES Desa Winong Dengan penmabahan Usaha produksi air minum isi ulang yang dimana saat ini cukup dibutuhkan msyarakat. Nantiya akan menjadi salah satu Unit usaha BUMDES.	Kec. Tugu; Desa/Kel. Winong; Rt 10 Rw 04 Dusun Benggle DesaWinong	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No. Urut Prioritas	Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Permasalahan	Lokasi (/Desa /Kel)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
MUSRENA KEREN									
01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#KEREN PETI KOIDN BERMANTRA Pternakan (kambing lokal untuk masyarakat miskin) (ID Usulan : 1928289)	perlunya bantuan hibah kambing bagi disabilitas dan masyarakat miskin (120 orang)	Kec. Tugu; Desa/Kel. Sukorejo; Desa Sukorejo	DINAS PETERNAKAN
02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGAADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	#KEREN Pelatihan Produk Olahan, Packaging dan Pemasaran Online bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat (ID Usulan : 1791289)	Minimnya pemasaran di UMKM Desa Gondang	Kec. Tugu; Desa/Kel. Gondang; Desa Gondang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045 adalah : **“NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, BERKELANJUTAN”**, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan dalam mencapai Sasaran dan Tujuan Pembangunan Nasional”.

RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi serta prioritas Presiden RI atau yang disebut dengan Astacita, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan urusan Kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang menggunakan konsep Trisula Pembangunan sebagai kerangka berfikir yang mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, maka Kecamatan menjadi Prioritas Nasional 1 yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), yang merupakan landasan dari Misi 5 Kabupaten Trenggalek yaitu “ Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani”.

Visi pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 adalah : **“KABUPATEN TRENGGALEK NET ZERO CARBON DENGAN PENDAPATAN TINGGI DAN DAYA SAING KOLEKTIF”**. Visi tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan dan pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan memberikan prioritas utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rangkaian aturan perundangan terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah periode 20 tahun mendatang.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, harus memperhatikan dan berpedoman pada visi, misi, dan arah

pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang pada RPJP Nasional dan sesuai dengan tema RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2029-2029 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur”

Sebagai dokumen resmi daerah, RPJMD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- a. Pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun;
- b. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD);
- c. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI);
- d. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah; dan
- e. Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tugu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek dengan Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2026 diarahkan pada tema : ***“Pembangunan Kota Atraktif dan Penuntasan Infrastruktur Dalam rangka Penghapusan Kemiskinan dan Adaptasi Perubahan Iklim”***.

Untuk itu guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 diupayakan harus sejalan, sinkron dengan kebijakan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah merupakan hal penting dalam mencapai efektifitas pembangunan serta sinkronisasi rencana pembangunan dan pertimbangan/asumsi yang menjadi landasan penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah provinsi menjadi faktor penting untuk dijadikan pedoman.

A. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2026

Penyusunan RPJPN 2025-2025 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini di kembangkan menjadi visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat. Maju, dan Berkelanjutan”, maka arahan utama Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 mencakup:

- 1) Kesehatan untuk semua;
- 2) Pendidikan Berkualitas yang merata;
- 3) Perlindungan Sosial yang Adaktif;
- 4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
- 5) Penerapan Ekonomi Hijau;
- 6) Transformasi Digital;
- 7) Intregasi Ekonomi Domestik dan Global;
- 8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
- 9) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adatif;
- 10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansi;
- 11) Stabilitas Ekonomi Makro;
- 12) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;
- 13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
- 14) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
- 15) Lingkungan Hidup Berkualitas;
- 16) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan;
- 17) Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim.

Ketujuh Belas arahan tersebut dijadikan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional

tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam Delapan (8) agenda pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial.

melalui :

- a) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Manusia pada seluruh Siklus Kehidupan; dan
- b) Menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera adil dan Kohesif.

2. Mewujudkan transformasi Ekonomi.

Meningkatkan Produktivitas melalui:

- a) Peningkatan IPTEK;
- b) Inovasi dan ekonomi pada sektor-sektor (Manufaktur, Ekonomi dan keuangan Syariah, Pertanian, Ekonomi Biru dan Bio ekonomi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM dan Koperasi, Tenaga Kerja, Blue Economy, Pertanian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM dan Koperasi, Tenaga Kerja serta BUMN);
- c) Penerapan ekonomi Hijau;
- d) Transformasi Digital;
- e) Integrasikan Ekonomi Domestik dan Global; dan
- f) Pembangunan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola,

tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, melalui :

- a) Menciptakan Lingkungan Kelembagaan yang bisa menghasilkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia,

dilaksanakan melalui :

- a) Memantapkan Stabilitas Ekonomi Politik, Hukum dan Keamanan Nasional;

- b) Memperkuat Ketangguhan Diplomasi Indonesia di Tingkat Global; dan
- c) Membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,
melalui:

- a) Memantapkan Ketangguhan Individu, keluarga, Masyarakat dan Lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya; dan
- b) Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, Perubahan dan Guncangan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan,

yaitu Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan melalui :

- a) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah secara umum; dan
- b) Penterjemahan Agenda Transformasi dan landasan transformasi.

7. Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan,

melalui :

- a) Mendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata Kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, melalui:

- a) Kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2026 adalah “PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SWASEMBADA PANGAN DAN ENERGI, SERTA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”.

Adapun Arah Kebijakan, strategi dan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2026, antara lain:

1. mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau;
2. peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Berdasarkan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 tersebut, Pemerintah menetapkan sasaran pembangunan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%;
- 2) Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 37,14%;
- 3) Indeks Kualitas lingkungan hidup 76,67%;
- 4) Rasio Gini (nilai) sebesar 0,377-0,380;
- 5) Indeks modal manusia sebesar 0,57;
- 6) Tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7,5%;
- 7) Gross National Income (GNI) Perkapita 5.870 Dolar Amerika Serikat (AS)

3.1.2 Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2026 merupakan Penjabaran tahun Pertama dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 mengacu dan memperhatikan Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Tema RKPD Tahun 2026 “Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

Sedangkan menurut RPJPD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2025-2045 dengan visi “Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, Dan Berkelanjutan”. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Misi Jawa Timur 20 Tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan Transformasi sosial dalam menunjang SDM yang berkelanjutan

Peningkatan Sumberdaya manusia dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan literasi ilmu pengetahuan, peningkatan kesehatan, dan pengendalian penduduk. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial dicapai melalui Pengentasan kemiskinan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kesejahteraan Keluarga.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang berkelanjutan

dicapai dengan cara meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui akselerasi industri pengolahan dan perdagangan, perluasan pasar Domestik serta Internasional, Optimalisasi Pertanian (dalam arti luas) melalui pengembangan Agrominapolitan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan UKM, koperasi dan BUMDesa, implementasi ekonomi biru dan ekonomi hijau, penguatan stabilitas ekonomi, penerapan ekonomi syariah dan ekonomi kreatif yang didukung transformasi digital dan infrastruktur/konektivitas pendukung ekonomi, sebagai perwujudan pencapaian visi Jawa Timur Mendunia.

3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif.

dicapai dengan membangun sistem pemerintahan yang handal (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance), Kebijakan pengawasan internal dan eksternal yang efektif dengan produk hukum yang berkualitas dan berintegritas, serta kapasitas aparatur daerah (ASN) yang gesit (Agile), inovatif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas.

4. Mewujudkan keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Sustansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Keamanan Daerah Tangguh dilakukan melalui optimalisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), Demokrasi Sustansial melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan, dan pendidikan politik untuk menjamin hak-hak politik dan demokrasi masyarakat. Sedangkan penguatan stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui penguatan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pemantapan ketahanan ekologi diwujudkan melalui pengembangan wilayah berbasis tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, perlindungan lingkungan hidup, ketahanan energi, air dan pangan, serta ketangguhan penanggulangan bencana dan perubahan iklim.

6. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang mendorong titik pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan pembangunan.

Misi ini difokuskan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, utamanya antara Wilayah Utara-Selatan, Madura Kepulauan. Upaya ini dilakukan dengan pemenuhan layanan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antar wilayah, dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dengan memperhatikan karakteristik wilayah.

7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.

Misi ini fokuskan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi yang

berkualitas, berwawasan lingkungan dan tangguh bencana. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dilaksanakan secara menyeluruh baik berupa infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sarana transportasi, sumberdaya air, energi dan pendukung pengembangan sektor riil, pertanian serta kelautan.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Misi ini dilaksanakan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen resiko, peningkatan sistem elektrik terpadu dan tata kelola data pembangunan, pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Creative Finance.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama (2025-2029) diarahkan untuk penguatan pondasi transformasi, transformasi sosial dititik beratkan pada pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan sesuai kondisi wilayah, peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data.

Transformasi ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumberdaya alam unggulan termasuk sektor Agro, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, penguatan sektor ekonomi yang berbasis riset dan inovasi, pemerataan akses digital, pengembangan sarana prasarana pariwisata, serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.

Transformasi tata kelola di fokuskan pada penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya dan penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, difokuskan pada penguatan peran dan fungsi

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif pada masyarakat Jawa Timur. Peningkatan peran dan fungsi dilakukan melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan demokrasi dan infrastruktur politik melalui kerjasama antar stakeholder dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama, budaya dan peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia serta menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen pengelolaan, serta perlindungan lingkungan hidup dan penguatan keterjangkauan pangan.

Pembangunan wilayah, difokuskan untuk perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui penyediaan optimalisasi sarana prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan. Pembiayaan pembangunan, dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Tugu

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur, sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pendukung perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Tujuan

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan umum yang akan dicapai dalam 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi dengan Tujuan Rencana Strategis
Tahun 2025-2029 Kecamatan Tugu

Misi	Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah	Indikator Tujuan
Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sesuai dengan Tujuan Rencana Strategis kecamatan Tugu pada Rencana Kerja kecamatan Tugu pada tahun 2026 adalah :

Tabel 3.2

**Tujuan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Rencana Kerja
Kecamatan Tugu Tahun 2026**

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah	Indikator Tujuan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan		
			Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Tahun 2025	Tahun 2026
Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Jumlah Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	88,30	88,33	88,35

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah secara nyata dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan). Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran pengawasan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja organisasi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kecamatan Tugu Kabupaten trenggalek. Dengan demikian apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan sasaran kinerja terkait dapat dicapai.

Sesuai dengan Sasaran Rencana Strategis kecamatan Tugu pada Rencana Kerja kecamatan Tugu pada tahun 2026 adalah :

Tabel 3.3

**Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Rencana Kerja
Kecamatan Tugu Tahun 2026**

Sasaran RENSTRA	Indikator	Formula/	Target Kinerja Sasaran
-----------------	-----------	----------	------------------------

	Sasaran	Rumus Perhitungan Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Tahun 2025	Tahun 2026
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	87,12 (A)	85 (A)	85,6 (A)
Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM)	Menunjukkan Indeks Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	99,99	90,00	90,50

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sebagai Perangkat Daerah kecamatan Tugu mendukung misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih periode tahun 2025-2029 yaitu misi yang ke 5 (Lima) “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani”.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan pada tema pembangunan Tahun 2026 **“Pembangunan Kota Atraktif dan Penuntasan Infrastruktur dalam rangka Penghapusan Kemiskinan dan Adaptasi Perubahan Iklim”** ada 3 (tiga) yaitu:

- Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Kota Atraktif dan Berwawasan Lingkungan Terintegrasi;
- Ekonomi regenerative dan Inklusi dalam rangka Penghapusan Kemiskinan;
- Pembangunan manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Dalam rangka mencapai visi, misi, prioritas pembangunan serta tujuan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, pada tahun 2026 perlu disusun program dan

kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Tugu akan melaksanakan 5(lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan sebagai pada Tabel 3.4 (T-C.33) dibawah ini:

Tabel 3.4 (T.C.33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Th. 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	KECAMATAN				2.372.858.353				2.448.255.300
7.01	KECAMATAN TUGU								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi;		100%	2.322.591.160			100%	2.376.445.200
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik		98,27%				100%	
		Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.490.235				1.484.235
7.01.01.2.01.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Tugu	15 Dokumen	1.221.600	DAU		15 Dokumen	1.215.600

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Th. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tugu	46 Laporan	268.635	DAU		46 Laporan	268.635
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.171.336.961				2.206.376.970
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tugu	15 Orang/bulan	2.126.770.291	DAU		15 Orang/bulan	2.161.810.600
7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Tugu	38 Dokumen	43.500.000	DAU		38 Dokumen	43.500.000
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Tugu	292 Dokumen	530.870	DAU		323 Dokumen	530.870
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Tugu	38 Laporan	535.800	DAU		38 Laporan	535.500
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.400				125.400

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Th. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.03.00 06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Tugu	27 Laporan	125.400	DAU		27 Laporan	125.400
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					101.400				101.400
7.01.01.2.05.00 03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.Tugu	47 Dokumen	101.400	DAU		52 Dokumen	101.400
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.123.154				59.153.713
7.01.01.2.06.00 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Tugu	2 Paket	3.155.600	DAU		2 Paket	2.996.000
7.01.01.2.06.00 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Tugu	3 Paket	7.012.400	DAU		3 Paket	7.012.400
7.01.01.2.06.00 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Tugu	4 Paket	4.437.000	DAU		4 Paket	4.437.000
7.01.01.2.06.00 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Tugu	3 Paket	3.762.000	DAU		3 Paket	3.762.223
7.01.01.2.06.00 07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec.Tugu	4 Paket	18.085.919	DAU		4 Paket	18.164.486

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Th. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.00 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tugu	12 Laporan	20.569.435	DAU		12 Laporan	22.680.804
7.01.01.2.06.00 10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.Tugu	12 Dokumen	100.800	DAU		12 Dokumen	100.800
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.930.000				25.545.072
7.01.01.2.07.00 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Tugu	3 Unit	10.930.000	DAU		3 Unit	25.545.072
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.170.800				39.170.800
7.01.01.2.08.00 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Tugu	41 Laporan	38.570.800	DAU		41 Laporan	38.570.800
7.01.01.2.08.00 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Tugu	2 Laporan	600.000	DAU		2 Laporan	600.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.313.210				44.487.610

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Th. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.00 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Tugu	12 Unit	25.913.210	DAU		12 Unit	29.303.210
7.01.01.2.09.00 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Tugu	18 Unit	6.400.000	DAU		18 Unit	6.400.000
7.01.01.2.09.00 11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Tugu	1 Unit	10.000.000	DAU		1 Unit	8.784.400
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan		100%	29.022.016			100%	52.525.200
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					14.324.925				24.949.925
7.01.02.2.01.00 01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Tugu	2 Laporan	14.324.925	DAU		2 Laporan	24.949.925

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Th. 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>				2.147.715				2.147.715
7.01.02.2.02.00 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tugu	12 Laporan	2.147.715	DAU		12 Laporan	2.147.715
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>				12.549.376				25.427.560
7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Tugu	12 Laporan	12.549.376	DAU		12 Laporan	25.427.560
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100%	4.981.792			100%	5.190.000
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				2.595.442				2.547.715
7.01.03.2.01.00 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tugu	1 Laporan	2.595.442	DAU		1 Laporan	2.547.715

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Th. 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				2.386.350				2.642.285
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec.Tugu	45 Keluarga	2.386.350	DAU		45 Keluarga	2.642.285
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti		100%	5.495.255			100%	6.113.200
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.495.255				6.113.200
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Tugu	12 Laporan	4.342.715	DAU		12 Laporan	4.342.715
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Tugu	6 Laporan	1.152.540	DAU		6 Laporan	1.770.485

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Th. 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu		100%	10.768.130			100%	7.981.700
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				10.768.130				7.981.700
7.01.06.2.01.00 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Tugu	12 Dokumen	5.572.700	DAU		12 Dokumen	2.786.350
7.01.06.2.01.00 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Tugu	12 Dokumen	5.195.430	DAU		12 Dokumen	5.195.350

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugu 2026, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2026, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2021-2026. Rencana Kerja memuat strategi dan kebijakan mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar- benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Pelaksanaan program Kecamatan Tugu akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugu Tahun 2026 dengan Pendanaan Anggaran Rp. 2.372.858.353 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) untuk dijabarkan dalam 5 (empat) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) sub kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Kecamatan Tugu tahun 2026 ada di table dibawah ini.

Tabel 4.1
Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Indikatif
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN TUGU KAB. TRENGGALEK
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KECAMATAN TUGU						2,372,858,353.00							2,448,255,300.00	KECAMATAN TUGU
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,372,858,353.00							2,448,255,300.00	
	7	0	1			KECAMATAN						2,372,858,353.00							2,448,255,300.00	
286	7	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;Persentase nilai aset dalam kondisi baik;Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	-			100;98,27;100%;%;%	2,322,591,160.00						-	2,376,445,200.00	
	7	0	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	-	-				1,490,235.00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-AMANA	Unit Kerja Kantor	-	1,484,235.00	KECAMATAN TUGU

						Kinerja Perangkat Daerah							politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat uat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek				
	70102.00	01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	1,221,600.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat uat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	JATIM BERKAHAMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		1,215,600.00	KECAMATAN TUGU

													judi, dan penyeludupan.	Partisipasi f Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis					
	701	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				46 Laporan	268,635.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipasi f Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		268,635.00	KECAMATAN TUGU	

															Dinamis						
	7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					2,171,336, 961.00			Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	JATIM BERKAH- AMANA H Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek	-	2,206,376, 970.00	KECAM ATAN TUGU
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15 Orang/b ulan	2,126,770, 291.00	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera	JATIM BERKAH- AMANA H Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih,	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		2,161,810, 600.00	KECAM ATAN TUGU

													ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis				
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		1	1	02	02													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				38 Dokumen	43,500,000.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	43500000,00	KECAMATAN TUGU

[illegible]

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				38 Laporan	535,800.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		535,500.00	KECAMATAN TUGU
	70102.	1103			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				125,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	JATIM BERKAH-AMANA H Mempe rkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	-	125400,00	KECAMATAN TUGU

														pe nyeludup an .	f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta h an yang Dinamis					
	7	0	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		1	1	03	06		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				27 Laporan	125,400.0 0	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	JATIM BER KAH- AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta h an yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		125400,00	KECAM ATAN TUGU
	7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian	-	-			101,400.0 0			Memperk uat	JATIM BERKAH-	Unit Kerja	-	101,400.0 0	KECAM ATAN	
		1	1	05																

						Perangkat Daerah							reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Kantor Kecamatan Tugugalek				TUGU	
	7	0	0	2.	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
		1	1	05	03		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				47 Dokumen	101,400.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugugalek		101,400.00	KECAMATAN TUGU

														judi, dan penyelud upan.	Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis					
	7 1	0 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					57,123,15 4.00		Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	JATIM BER KAH- AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara a n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta h an yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek	-	59153713, 00	KECAM ATAN TUGU
	7 1	0 1	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan														

					Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,155,600. 00	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	JATIM BER KAH- AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara a n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta h an yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		2996000,0 0	KECAM ATAN TUGU
	7 1	0 1	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7,012,400. 00	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc	JATIM BER KAH- AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara a n Tata Kelola Pem erintahan	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		7012400,0 0	KECAM ATAN TUGU

													egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis				
	70102.00				Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4,437,000.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	JATIM BERKAH-AMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		4437000,00	KECAMATAN TUGU

															Kelola Pemerintah an yang Dinamis					
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3,762,000. 00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN A ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAHAMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Tren ggalek		3,762,223. 00	KECAMATAN TUGU
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	18,085,91 9.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN A ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	JATIM BERKAHAMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Tren ggalek		18,164,48 6.00	KECAMATAN TUGU

													memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis					
	71	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	20,569,435.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		22,680,804.00	KECAMATAN TUGU

															Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis					
	7	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	100,800.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		100800,00	KECAMATAN TUGU
	7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				10,930,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	-	25,545,072.00	KECAMATAN TUGU

														serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis					
	7	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	1	1	1	07	06		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10,930,000.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		25,545,072.00	KECAMATAN TUGU

															Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis					
	7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				39,170,80 0.00			Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	JATIM BERKAH- AMANA H Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek	-	39,170,80 0.00	KECAM ATAN TUGU
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				41 Laporan	38,570,80 0.00	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	JATIM BERKAH- AMANA H Memperk uat Penyeleng garaan Tata	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		38,570,80 0.00	KECAM ATAN TUGU	

													memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis					
	71	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	600,000.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAHAMANAHA				

															Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis					
	7 1	0 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				42,313,21 0.00			Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	JATIM BER KAH- AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara a n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta h an yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek	-	44487610, 00	KECAM ATAN TUGU
	7 1	0 1	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	25,913,210.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	JATIM BERKAHAMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		29303210,00	KECAMATAN TUGU
	70102.00	010906				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					18 Unit	6,400,000.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	JATIM BERKAHAMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif,	Unit Kerja Kantor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		6,400,000.00	KECAMATAN TUGU

														korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis				
	7 1	0 1	0 1	2. 09	00 11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				1 Unit	10,000,00 0.00	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	JATIM BER KAH- AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara a n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan	Unit Kerja Kantor Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		8784400,0 0	KECAM ATAN TUGU

															Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis				
287	712	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	-			100 %	29,022,016.00						-	52,525,200.00	
	712	02.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-				14,324,925.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	-	24949925,00	KECAMATAN TUGU
	712	02.01.00		00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan														

					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	14,324,925.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		24,949,925.00	KECAMATAN TUGU
	701202				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-				2,147,715.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	-	2147715,00	KECAMATAN TUGU

													dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis				
	71	02	02	2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2,147,715.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		2,147,715.00	KECAMATAN TUGU

															Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis					
	7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-					12,549,37 6.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	-	25,427,56 0.00	KECAMATAN TUGU
	7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain				12 Laporan	12,549,37 6.00	Kab. Trenggalek,	DAN A ALOK	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-AMANAHAH	Masyarakat Wilayah		25,427,56 0.00	KECAMATAN TUGU

							yang Dilimpahkan						Tugu, Semua Kel/De sa	ASI UMU M (DAU)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis	Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek						
2 8 8	7 1 3	0 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	-			100 %	4,981,792. 00							-	5,190,000. 00				
	7 1 3	0 1 3	2. 01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-				2,595,442. 00			Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi.	JATIM BERKAH- AMANAHA Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya	Masyara kat Wilayah Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek	-	2,547,715. 00	KECAM ATAN TUGU				

													narkoba, judi, dan penyeludupan.	Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis				
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	1	3	01	03														
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2,595,442.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	2,547,715.00	KECAMATAN TUGU

															han yang Dinamis						
	71	03	06	2.		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-					2,386,350.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	JATIM BERKAHAMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	-	2642285,00	KECAMATAN TUGU
	71	03	06	2.	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan				45 Keluarga	2,386,350.00	Kab. Trenggalek, Tugu,	DAN ALOKASI	Memperkuat reformasi politik,	JATIM BERKAHAMAN AH Mempe	Masyarakat Wilayah Kecamatan		2642285,00	KECAMATAN TUGU	

						Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	rkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	an Tugu Kab.Trenggalek				
289	7014	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	-			100 %	5,495,255.00						-	6,113,200.00		
	7014	02.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-				5,495,255.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek	-	6,113,200.00	KECAMATAN TUGU	

													narkoba, judi, dan penyelud upan.	Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis					
	7 1	0 4	0 1	2. 01	00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	4,342,715. 00	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	JATIM BERKAH- AMANA Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya	Masyara kat Wilayah Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		4,342,715. 00	KECAM ATAN TUGU

															Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis				
	7 1	0 4	0 01	2. 02	00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	1,152,540. 00	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	JATIM BERKAH- AMANAHA Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis	Masyara kat Wilayah Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		1,770,485. 00	KECAM ATAN TUGU
2 9 0	7 1	0 6	0 0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH N DESA					10,768,13 0.00							7,981,700. 00	

	7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi						10,768,13 0.00			Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	JATIM BERKAH- AMANA H Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipati f Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerinta han yang Dinamis	Masyara kat Wilayah Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek	-	7,981,700. 00	KECAM ATAN TUGU
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokume n	5,572,700. 00	Kab. Trengg alek, Tugu, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera	JATIM BERKAH- AMANA H Memperk uat Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik, Bersih,	Masyara kat Wilayah Kecamat an Tugu Kab.Tren ggalek		2,786,350. 00	KECAM ATAN TUGU	

													ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis						
	70160100					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12 Dokumen	5,195,430.00	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola	Masyarakat Wilayah Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek		5,195,350.00	KECAMATAN TUGU

															Pemerintah yang Dinamis				
	J U M L A H										2,372,858,353.00							2,409,520,609.50	

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tugu 2026, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2026. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 yang telah diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2021-2026, maka segenap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Rencana Kerja Kecamatan Tugu Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 kepada semua stakeholder pembangunan. Untuk mengoperasionalkan program dan kegiatan yang ada di Renja perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) Good Governance and Clean Government; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta; serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Trenggalek selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tahun 2026 yang memuat program dan kegiatan pelaksanaan program Kecamatan Tugu yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026. Selain itu dapat dijadikan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar senantiasa selaras dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya

Pada akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004



PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK



PR
DA

